

**EFEKTIVITAS PROGRAM PENCEGAHAN PENANGANAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOBA (P4GN) OLEH
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH**

Nanik Latifah, Maesaroh, M.Si

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

Abstrak

Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah melalui BNN tahap tahun 2011-2015 dengan tujuan mengendalikan penyalahgunaan NAPZA. Program P4GN ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Akan tetapi pengguna narkoba setiap tahunnya meningkat jumlahnya, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai Efektivitas Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan apa saja faktor-faktor yang memengaruhi dalam efektivitas pelaksanaan program tersebut. Metode yang digunakan peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian adalah program P4GN (Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) cukup efektif dalam menanggulangi penggunaan narkoba, namun masih belum maksimal dengan adanya peningkatan jumlah pengguna setiap tahunnya. Adapun penilaian efektivitas program P4GN dilihat melalui tiga kegiatan yang dilaksanakan yaitu pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi narkoba. Pencegahan penggunaan narkoba adalah seluruh usaha yang ditujukan guna mengurangi permintaan dan kebutuhan narkoba oleh masyarakat secara illegal. Pemberantasan narkoba ialah upaya yang dilakukan guna mengurangi penggunaan narkoba setelah terjadinya penyalahgunaan. Pemberantasan juga dilakukan agar pelaku jera sehingga akan berhenti menggunakannya. Sedangkan rehabilitasi adalah proses pemulihan pada ketergantungan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif. Kegiatan rehabilitasi meliputi dua hal yaitu *Group Therapy* dan bimbingan teknik layanan rehabilitasi Rekomendasi untuk Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yaitu meningkatkan sosialisasi terkait bahaya narkotika secara lebih luas kepada masyarakat tidak hanya berfokus kepada sekolah ataupun universitas saja. Selanjutnya mempertegas penindakan terhadap penyalahgunaan maupun peredaran narkotika supaya membuat jera pelanggar.

Kata kunci: *program P4GN, pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi*

**EFEKTIVITAS PROGRAM PENCEGAHAN PENANGANAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOBA (P4GN) OLEH
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH**

Nanik Latifah, Maesaroh, M.Si

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

Abstrack

The P4GN Program (Prevention, Eradication of Drug Abuse and Circulation) is a program launched by the government through the 2011-2015 by *Badan Narkotika Nasional* with the aim of controlling drug abuse. The P4GN program is based on Presidential Regulation Number 23 of 2010 concerning the *Badan Narkotika Nasional*. However, drug users are increasing every year, researchers want to investigate more about the Effectiveness of the P4GN Program (Prevention, Eradication, Illegal Use and Circulation of Drugs) by the *Badan Narkotika Nasional* Province of Central. The method used by researchers is descriptive with a qualitative approach. The results obtained from the study are the P4GN program (the Program for the Prevention, Eradication, Illegal Use and Circulation of Drugs) is quite effective in tackling drug use, but it is still not optimal with an increasing number of users each year. The assessment of the effectiveness of the P4GN program is seen through three activities carried out namely prevention, eradication and drug rehabilitation. Prevention of drug use is all efforts aimed at reducing the demand and drug needs by the public illegally. Drug eradication is an effort made to reduce drug use after abuse. Eradication is also done so that the deterrent will stop using it. While rehabilitation is a process of recovery in a comprehensive dependency on narcotics abuse. The rehabilitation activities include two things, namely group therapy and rehabilitation service technical guidance. Recommendations for the *Badan Narkotika Nasional* in Central Java Province, namely to increase socialization related to the dangers of narcotics more broadly to the public, not only to focus on schools or universities. Furthermore, it emphasizes the enforcement of narcotics abuse and trafficking in order to deter offenders.

Keyword: *prevention, eradication, rehabilitation*

PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang terbesar di Asia. Indonesia memiliki luas sekitar 1,905 juta km². Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang terbesar di dunia dengan kepadatan penduduk sebesar 138/km². Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 237.641.326 juta jiwa.

Adanya fakta bahwa negara Indonesia memiliki penduduk yang besar, menjadikan banyak permasalahan yang dihadapi. Salah satu permasalahan

penting ialah, permasalahan mengenai narkoba yang sejak dahulu telah menjadi masalah yang memerlukan penanganan secara khusus. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional yang dikutip dalam *liputan6.com* jumlah pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2017 telah mencapai angka 3,5 juta jiwa dengan diantaranya 1,5 juta jiwa sebagai pecandu aktif.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dari lembaga non struktural menjadi struktural sebagai Lembaga Pemerintah

Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Untuk selanjutnya Badan Narkotika Nasional (BNN) dari lembaga non struktural menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai perwakilan di tingkat Provinsi yaitu BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) dan BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota) sebagai Instansi Vertikal. Terkait hal tersebut, BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) menjadi bagian satuan tugas, yang mana Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota merupakan

mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota sebagai lembaga yang menangani permasalahan mengenai narkoba khususnya di setiap provinsi.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan upaya penyelamatan bangsa dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melakukan upaya preventif dan represif melalui pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara intensif dan ekstensif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan

negara. Upaya tersebut dilakukan dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara *demand reduction* dan *supply reduction* berdasarkan prinsip “*common and share responsibility*”.

Berdasarkan permasalahan yang muncul mengenai tingginya penyalahguna di masyarakat provinsi Jawa Tengah tersebut, menjadi bahan rujukan penulis dalam rangka pelaksanaan penelitian mengenai “Efektivitas Program P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba) Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah”. Penelitian yang akan membahas mengenai

bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam usaha pemberantasan dan penanggulangan narkoba di kalangan masyarakat. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan rujukan dalam rangka pengurangan jumlah penyalahgunaan narkoba di provinsi Jawa Tengah.

B. RUMUSAN MASALAH

Masalah didefinisikan sebagai serangkaian atau setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya, masalah itu sebagai rintangan yang mesti harus dilalui jalan untuk mengatasinya. Perumusan masalah digunakan untuk

mengungkap pokok-pokok pikiran secara jelas mengenai hakikat dari masalah tersebut. Masalah akan muncul apabila terjadi keadaan dimana terdapat ketidaksesuaian atau kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Dari uraian diatas terdapat berbagai permasalahan yang harus diselesaikan. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana upaya efektivitas penanganan narkoba melalui program P4GN oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah?

C. TUJUAN

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan tentang apa yang ingin dicapai oleh penulis. Berdasarkan rumusan masalah tentang upaya penanganan narkoba melalui program P4GN oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah tersebut, maka tujuan dalam penelitian adalah:

Menganalisis efektivitas program P4GN oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

D. KAJIAN TEORI

Administrasi Publik

Pengertian Administrasi Publik menurut Siagian (1996:8) dalam Amin Ibrahim (2013)

adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Sedangkan menurut John M. Pfifner dan Robert V, Presthus dalam Inu Kencana Syafie (2010:23-24) administrasi publik didefinisikan meliputi:

1. Administrasi publik meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan
2. Administrasi publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan

kebijaksanaan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.

3. Secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang

Manajemen Publik

Manajemen Publik menurut Overman dalam Harbani Pasolong (2014:83) adalah

studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik di sisi lain. Definisi lain menurut J. Steven Ott, Albert C. Hyde dan Jay M. Shafritz manajemen publik mengalami transisi beberapa isu terpenting yang akan menantang yaitu:

1. Privatisasi sebagai suatu alternatif bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik
2. Rasionalitas dan akuntabilitas
3. Perencanaan dan kontrol

4. Produktivitas sumber daya manusia

Berdasarkan pendapat beberapa ahli mengenai manajemen publik dapat dinyatakan bahwa manajemen publik merupakan pengelolaan yang dilakukan oleh pegawai dalam organisasi yang dapat diukur dengan kinerja pegawai. Kinerja untuk melayani publik dengan sebaik – baiknya dan publik merasa seluruh kebutuhannya terpenuhi. Manajemen publik memiliki fungsi yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), pengawasan (*controlling*). Fungsi manajemen ini dapat digabungkan satu sama lain

untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan organisasi.

Efektivitas

Menurut Schemerhon John R. Jr. dalam Lysa Angrayni (2018:14) efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika $(OA) > (OS)$, disebut efektif. Definisi lain dikemukakan Prasetyo Budi Saksono mengenai efektivitas yaitu seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat

seederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya.

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan.

Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Menurut Duncan yang dikutip dalam Richard M. Steers (1985:53) mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.
- b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

E. METODE PENELITIAN

Menurut Anselm Strauss dan Juliet Corbin dalam Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data (2003:4) Penelitian kualitatif kami maksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-

temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya. Contohnya dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang disamping juga tentang peranan organisasi pergerakan sosial atau hubungan timbal balik. Michael Quiin Patton (2009:1) membagi 3 pengumpulan data secara kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam, wawancara dengan format pertanyaan terbuka
2. Obeservasi langsung
3. Pemanfaatan dokumen tertulis, termasuk sumber-sumber tertulis dari hasil wawancara terbuka pada kuesioner, buku harian

seseorang, dan catatan program

Dalam penelitian mengenai efektivitas program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis untuk menonjolkan makna dan tujuan dari penelitian tersebut.

PEMBAHASAN

Untuk melihat seberapa efektif program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba) oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa

Tengah, dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

Pencegahan Narkoba

Penyelenggaran program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat cukup efektif. Jumlah peningkatan kegiatan sosialisasi dari tahun 2018 yang berjumlah 101 kegiatan, bertambah menjadi 109 kegiatan per September 2019. Peningkatan tersebut merupakan hal yang cukup bagus untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang lebih luas.

Walaupun telah dilakukan sosialisasi yang cukup efektif, namun masih tinggi jumlah pengguna narkoba yang

ada dimulai dari tahun 2015 hingga kini yang hampir mencapai 350.000 jiwa. Selain itu kurangnya minat masyarakat mengenai bahaya narkoba juga menjadi suatu hal pertimbangan, hanya terbatas pada kalangan pendidikan yang sudah mulai menyadarinya

Pemberantasan Narkoba

Pemberantasan narkoba ialah upaya yang dilakukan guna mengurangi penggunaan narkoba setelah terjadinya penyalahgunaan. Pemberantasan juga dilakukan agar pelaku jera sehingga akan berhenti menggunakannya. Pengendalian ini bersifat represif dengan menanggapi penyalahgunaan yang terjadi serta hukumannya yang jelas. Berdasarkan tabel di atas

dapat dilihat bahwa jumlah penyalahguna dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Hal tersebut menandakan kurang efektifnya pelaksanaan program pemberantasan narkoba dan juga permasalahan tindak tegasnya.

Rehabilitasi

Proses rehabilitasi yang dilakukan sudah cukup efektif. Melalui pelaksanaan *group therapy* yang dilakukan secara bersama-sama dengan penyalahguna lain bertempat di IPWL (Instansi Penerima Wajib Lapor) maupun tempat lain yang biasa dilakukan pelatihan kepada para klien. *Group therapy* ini sudah cukup efektif dalam penanganan pengguna narkoba yang telah menjalani narkoba

untuk kembali ke kehidupan sosialnya.

Cakupan untuk bimbingan teknis layanan rehabilitasi masih sulit untuk dijangkau satu persatu. Seperti yang telah diketahui, untuk kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah berjumlah 35. Namun jumlah Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota hanya baru terbentuk 9. Perlunya suatu cara yang efektif guna melaksanakan bimbingan tersebut. Oleh karenanya dilakukan rapat koordinasi yang bertujuan untuk mengumpulkan lembaga yang melayani rehabilitasi untuk kemudian dilakukan evaluasi, *sharing* dan pembenahan rehabilitasi ke arah yang lebih baik guna

penyembuhan klien. Selain itu juga rapat koordinasi memberikan informasi dan cara-cara yang lebih efektif guna penyembuhan klien oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Untuk pelaksanaan bimbingan teknis layanan rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dilakukan pada tahun 2019 ini sudah lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya berjumlah 17 (tujuh belas) kegiatan. Untuk tahun 2019 ini bimbingan teknis layanan rehabilitasi sudah mencapai 21 (dua puluh satu) kegiatan. Oleh karenanya proses rehabilitasi yang dilakukan sudah cukup efektif dalam penanganan narkotika setelah

terjadi penyalahgunaan untuk menyembuhkan klien yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiyono, Amirullah Haris. 2004. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha. 2008. *Kompetensi Plus: Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR serta Organisasi yang Dinamis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Ibrahim, Amin. 2010. *Pokok-Pokok Administrasi Publik Dan Implementasinya*. Bandung: Refika Utama
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Nawawi, Ismail. 2009. *Perilaku Administrasi: Kajian, Teori*

- dan Pengantar Praktik.*
Surabaya: ITS Press.
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik.*
Bandung: Alfabeta
- Prasetyo, Bambang. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rudianto. 2006. *Akuntansi Manajemen: Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Manajemen.* Jakarta: Grasindo
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi.* Jakarta: Erlangga.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik.*
Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, Agus. 2009. *Metode Penelitian Administrasi.*
Bandung: Alfabeta.
- Syafie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi).* Jakarta: Rineka Cipta.
- Tangkisilan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik.* Jakarta: Grasindo
- Yusriadi. 2018. *Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik.*
Yogyakarta: Budi Utama
- Regulasi**
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Badan Narkotika Nasional
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional 4 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
- Jurnal**
- Caballo, Vicente E., Gloria B. Carrillo, dan Thomas H. Ollendick.

2015. *Effectiveness Of A Social Skills Play-Based Training Program Intervention For Childhood Social Anxiety*. *Journal Behavioral Psychology / Psicología Conductual*, Volume 23 Nomor 3.
- Denhardt, Robert B. dan Janet V. Denhardt. 2000. *The New Public Service: Serving, not Steering*. Volume 11 Nomor 1.
- Emalia, Zulfa. 2013. *Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Raskin di Kota Bandar Lampung*. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Volume 6 Nomor 1.
- Edriyana, Ganda Putra .2016. *Efektivitas Pelaksanaan Program Dusun Bebas Empat Masalah Kesehatan (DB4MK) Dalam Penurunan Kasus DBD di Desa Banguntapan*. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*. Volume 23 Nomor 1.
- Lestari, Rini Puji dan Indah Murti. 2015. *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) (Studi Kasus: Desa Sedengan Mijen Kec. Krian Kab. Sidoarjo)*. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* Volume 1 Nomor1.
- Sholihah, Qomariyatus. 2013. *Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Napza*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Volume 9 Nomor 1.
- Internet**
- Struktur Organisasi*. Dalam jateng.bnn.go.id diakses pada 10 Desember 2016 Pukul 20.19 WIB
- Paradigma Administrasi Publik*. Dalam <http://fia->

[ub.blogspot.co.id/2015/11/para
digma-administrasi-publik.html](http://ub.blogspot.co.id/2015/11/para-digma-administrasi-publik.html)
diakses pada 31 Maret 2017
Pukul 20.25 WIB

Peraturan Kepala Badan Narkotika

Nasional. Dalam
[ditjenpp.kemenkumham.go.id/k
erja/bnnew.php?tah](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kerja/bnnew.php?tah) diakses 16
Juni 2019 Pukul 09.58 WIB